

**UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN
UMUM DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kelurahan
Simpang Baru) TAHUN 2011-2012**

Julius dan Wan Asrida
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Abstrak: Pekanbaru city with all its pros and cons when it has become a metropolis. But over time the city of Pekanbaru apparently logical consequence of the emergence of various problems such as: population, poverty, employment, safety, health, hygiene, settlements, congestion, terminal shadow, travel illegally and so on. One of the most interesting issues to be discussed today is the problem of illegal travel that is increasing every year. This study aims to determine the effort made in the control of the Department of Transportation public transportation less than optimal and to determine the limiting factors faced by the Department of Transportation to perform an audit of public transport. Theory of coordination, oversight, and policy is the premise of this research. The method used is descriptive method of analysis with a qualitative approach that seeks to analyze the problems that arise in the field and try to describe very clearly. Based on the analysis that has been done, it can be seen that the efforts of the Department of Transportation under the control of public transport not running optimally, the condition is that it is difficult to reduce or eliminate illegal travel or travel agency in the city of Batam. This is due to a lack of awareness of international law and the lack of firmness in carrying out these rules. And in doing controlling the many efforts undertaken by the Department of Transportation, the Surveillance, raid/crawl, Data Collection and Guidance (socialization). The limiting factors facing the Department of Transportation to implement enforcement of Illegal Travel Public transport in particular is coming from the government, from the elements of the Department of Transportation, and the Society of the elements of the elements of PO/driver. In accordance with the results of this study, the government should be more assertive in implementing policing or public transport travel in particular the growing illegal agents.

Key Word: Department of Transportation, Effort Control public transport, and Public Transportations

1. PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru merupakan kota yang dinamis dan strategis jika dilihat dari letak geografisnya yang berdekatan dengan Negara Malaysia dan Singapore serta memiliki akses yang lancar di wilayah provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Kota Pekanbaru juga merupakan salah satu pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan, dan pusat kebudayaan melayu serta kota yang baru berkembang seiring dengan pertumbuhan usia kota yang semakin tua dan ditambah lagi persaingan dengan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan tersebut mengakibatkan tingginya tingkat pertumbuhan penduduk baik yang datang dari luar Kota Pekanbaru maupun yang disebabkan angka kelahiran. Dengan demikian timbullah permasalahan kota seperti tingginya angka pengangguran, kriminalitas dan permasalahan lalu lintas serta permasalahan-permasalahan lainnya.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan, daerah simpang empat Garuda Sakti merupakan salah satu jalur penghubung atau jalur lintas antara Kota Pekanbaru dengan Kota Bangkinang. Sehingga di simpang empat Garuda Sakti sering terjadi kemacetan pada kemacetan pada waktu-waktu tertentu seperti di pagi hari pukul 07.00-08.00 WIB, di siang hari pada pukul 13.00-14.00 WIB, dan di sore hari pada pukul 16.00-18.00 WIB. Kemacetan ini lambat laun semakin meningkat dan sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan lainnya dan masyarakat sekitar.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012) jumlah kendaraan atau angkutan umum yang melanggar peraturan mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan atau Angkutan Umum di Kota Pekanbaru dalam Kurun Waktu 2008-2012

No.	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2008	157	9 %
2	2009	117	7 %
3	2010	561	33 %
4	2011	301	18 %
5	2012	543	32 %
TOTAL		1679	100 %

Sumber: BPS, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2012

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2008 angkutan umum berjumlah 157 unit (9%), pada tahun 2009 angkutan umum berjumlah 117 unit (7%),

pada tahun 2010 angkutan umum berjumlah 561 unit (33%), sedangkan pada tahun 2011 angkutan umum berjumlah 301 unit (18%). Namun pada tahun 2012 angkutan umum berjumlah 543 unit (32%). Hal ini berarti jumlah kendaraan atau angkutan umum tiap tahunnya mengalami peningkatan. Bukan tidak mungkin dalam kurun waktu 1-2 tahun kedepan jumlah kendaraan atau angkutan umum akan semakin meningkat. Persoalan inilah yang seharusnya patut untuk kita cermati bersama. Namun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang penulis dapatkan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas di atas belumlah berjalan optimal sehingga masih banyak ditemukan agen liar dalam pengambilan penumpang tetapi tidak ada tanda plang nama kendaraan travel tersebut
2. Banyak juga supir minibus Jurusan Sumantra Barat, Bangkinang dan Pasir Pangaraian yang sering menaikkan dan menurunkan penumpang di sepanjang jalan H. R Soebrantas daripada didalam terminal.
3. Upaya penertiban angkutan umum ini sudah dilaksanakan selama 3,5 tahun oleh Dinas Perhubungan namun hasilnya masih belum optimal.

Oleh karena itu, penulis berharap dengan solusi yang penulis berikan dapat membantu menyelesaikan permasalahan terhadap agen liar atau angkutan ilegal sehingga ketertiban dan kenyamanan tetap terjaga. Maka dari permasalahan di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul:

“UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM DI KOTA PEKANBARU (Studi Kasus di Kecamatan Tampan Kelurahan Simpang Baru) TAHUN 2011-2012”.

2. LANDASAN TEORI

A. Teori Koordinasi

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003:291) bahwa “koordinasi adalah penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sehingga disisi yang satu semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain”.

Tujuan Koordinasi :

1. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan, dan kesinambungan antar berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
2. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
3. Menciptakan dan memelihara iklim dan sifat saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda.

Syarat- Syarat Koordinasi :

1. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per-bagian.
2. Rivalry, dalam perusahaan besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba untuk kemajuan.
3. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. Esprit de Corps, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Sifat-Sifat Koordinasi :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

B. Teori Kebijakan

Istilah ‘kebijakan’ dalam bahasa Inggris ‘*policy*’ yang berasal dari bahasa latin, yaitu kata *polis* yang artinya *community* atau paguyuban (persekutuan) hidup manusia, masyarakat atau *city* (negara kota). Secara etimologis, istilah *policy* (kebijakan) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta adalah “*polis*” (negara-kota) dan “*pur*” (kota) dikembangkan sedangkan dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris pertengahan “*policie*”, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. (William N. Dunn, 2003:51)

Menurut Anderson dalam Said Zainal Abidin (2002:39) ada beberapa ciri dari kebijakan yaitu :

1. Kebijakan harus ada tujuannya.

2. Kebijakan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari kebijakan lain.
3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah.
4. Kebijakan harus didasarkan pada hukum.

Menurut **Leo Agustino (2008:157)** bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi kebijakan, yaitu:

- a. Faktor pendukung, antara lain:
 1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah.
 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan.
 3. Adanya sanksi hukum.
 4. Adanya kepentingan pribadi dan publik.
 5. Masalah waktu.
- b. Faktor penghambat, antara lain:
 1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang mengada.
 2. Tidak adanya kepastian hukum.
 3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi.
 4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum.

C. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah menjamin segala sesuatu pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan, pengawasan sendiri mengikuti perkembangan sekaligus mengantisipasi terjadinya kendala dan mencari solusi.

Yang dimaksud dengan pengawasan pemerintahan adalah pengawasan terhadap pemerintahan. Mengapa pemerintahan yang berkuasa mesti juga diawasi, karena mereka memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus segala persoalan rakyat dengan baik dan benar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian Kualitatif. Sedangkan tahapan-tahapan penelitian kualitatif melalui tahapan berfikir kritis, yang mana seorang peneliti memulai berfikir secara edukatif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan dilapangan, kemudian dianalisis dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. (**Burhan Bungin, 2008:6**)

Dalam meneliti upaya Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru menggunakan penelitian kualitatif, karena untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan dinas perhubungan dalam penertiban angkutan umum di Kota Pekanbaru baik dilapangan maupun dikantoran. Selain itu dengan menggunakan

penelitian kualitatif peneliti bisa mengedepankan kreatifitas dalam menggali informasi yang diinginkan, sehingga memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang terjadi.

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pekanbaru khususnya di simpang empat Garuda Sakti Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Teknik pengambilan informan yang penulis gunakan adalah yang mengacu kepada pendapat **Suharsimi Arikunto (2010:183)** dengan teknik *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti memilih berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu atau sifat informan, yakni yang berhubungan dengan data apa saja yang menjadi bahan penelitian ini. Jadi, untuk penelitian ini penulis mengambil informasi dari informan yang berkaitan dengan sumber datanya di lokasi penelitian.

Tabel 1.2 Daftar Nama Informan Penelitian

Jabatan	Nama
Ketua Komisi II DPRD	Noprizal
Wakil Ketua DPRD	Dian Sukheri
Ketua Organda	Syaipul Alam
Kepolisian	Ongki H, SE
Kepala Dinas Perhubungan	S. Sayuti
Kepala Bidang Angkutan	Azliar
Kasi Angkutan Jalan	Natur R. Y, SH
Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lantas	Ade Budhi Adrian, S.Sos
Kepala Seksi Wasdal	Max Robert
Supir Angkutan Umum	Miran
Supir Angkutan Umum	Bembeng
Penumpang	Endriko
Penumpang	Dwi
Penumpang	Raymond R. H

Sumber: Data Olahan Lapangan 2012

Penulis mendapatkan data berasal dari metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis.

Setelah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, kemudian penulis akan memilih dan menggolongkan data sesuai jenisnya. Selanjutnya penulis akan menganalisa data secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara jelas berdasarkan kenyataan dilapangan sehingga diperoleh suatu analisa seobjektif mungkin. Dalam menganalisa data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu pengamatan terhadap upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan

umum dan hambatan-hambatan dari upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN UMUM

Secara umum ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban angkutan umum antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan atau pemantauan rutin dilaksanakan dan langsung turun kelapangan. Namun, dalam menindaklanjuti maraknya angkutan travel gelap, sebenarnya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah kota. Petugas yang bertugas hanya menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan saja. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu melakukan diskusi dengan organda atau pengusaha Angkutan Travel.

2. Razia/Penjaringan

Petugas Dinas perhubungan dan Polisi lalu lintas Kota Pekanbaru sering melaksanakan razia terhadap angkutan ilegal ini. Baik secara teratur maupun secara tiba-tiba. Namun, tetap tidak membuat kapok para supir angkutan ini serta pemiliknya. Menurut informasi yang beredar di lapangan, pemilik kendaraan angkutan ilegal dilindungi oleh oknum petugas Polisi, Dishub dan TNI.

Hal-hal diatas yang membuat menjamurnya angkutan penumpang ilegal beroperasi di Provinsi Riau terutama yang berada di Kota Pekanbaru. Ditambah lagi fasilitas yang ditawarkan sangat nyaman dan eksekutif. Sehingga, membuat pengguna jasa angkutan penumpang ilegal ini semakin banyak. Akibatnya, pengusaha angkutan umum yang berizin menjadi rugi dan banyak yang gulung tikar karena hal ini ditambah lagi fasilitas dari angkutan umum minim fasilitas.

Dalam kegiatan razia/penjaringan angkutan umum yang ilegal oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilakukan setiap hari dengan memeriksa kelengkapan supir angkutan umum seperti KIR, SIM (baik SIM A maupun SIM angkutan umum), STNK, dan Surat Izin Trayek. Sedangkan untuk agen angkutan umum adalah Surat Izin

Bangunan dan Usaha. Dalam melakukan patroli ini bekerja sama dengan Tim Penertiban yang telah dibentuk oleh Walikota Pekanbaru.

Pada tahun 2012 ini setiap beroperasi sebanyak 10 orang petugas pemerintah, yaitu 5 orang pegawai Dinas Perhubungan, 2 orang petugas Satpol PP, 2 orang petugas Polri dan 1 orang petugas TNI dengan menggunakan dua unit mobil patroli Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan razia ini banyak petugas yang kedapatan menerima uang jaminan dari para supir sebesar 30% dari biaya di pengadilan Rp 85.000,- yaitu Rp 59.500,- atau genapnya Rp 60.000,-.

Jumlah dana atau anggaran yang dikeluarkan untuk melakukan razia travel ilegal ini di Kota Pekanbaru adalah berjumlah \pm Rp 300.000.000,- yang dibebankan kepada APBD Kota Pekanbaru untuk jangka waktu satu tahun anggaran memang dirasakan kurang. Bayangkan saja jika satu tahun \pm Rp 300.000.000,- maka jika dibagi dalam 12 bulan (1 tahun = 12 bulan), maka dalam satu bulan operasional sebesar Rp 25.000.000,- sedangkan razia dilaksanakan setiap hari maka jika dana operasional satu bulan sebesar Rp 25.000.000,- dibagi 30 hari, maka dalam satu kali razia dana operasional yang dikeluarkan sebesar Rp 833.000,-. Jumlah yang sedemikian merupakan jumlah yang sedikit/kurang menurut pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Solusi atas masalah biaya atau dana operasional ini sebaiknya dirinci menurut keperluan dan kegunaan dana tersebut, jangan sampai dana yang telah didapat ternyata disalahgunakan untuk keperluan yang lain. Inilah yang seharusnya diawasi penggunaan dana operasional tersebut.

Secara umum dapat peneliti simpulkan bahwa pada umumnya angkutan umum terutama travel-travel di Simpang Garuda Sakti Kota Pekanbaru ini hanya untuk menambah penghasilan saja, karena terpaut masalah ekonomi. Dengan kata lain, masalah ekonomi ini harus sangat diperhatikan.

3. Pendataan

Dalam melakukan pendataan Dinas Perhubungan saling bekerja sama. Berdasarkan hasil pendataan yang diperoleh di lapangan mengapa para supir tidak ingin masuk keterminal karena di terminal tidak ada penumpang. Dalam pendataan tidak dilakukan secara sembarangan namun memperhatikan beberapa prinsip. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pendataan, yaitu:

- 1) Prinsip penerimaan.
- 2) Prinsip tidak menghakimi (Non Judgemental).
- 3) Prinsip individualisme.
- 4) Prinsip kerahasiaan.
- 5) Prinsip partisipasi.
- 6) Prinsip komunikasi.
- 7) Prinsip kesadaran diri.

Kegiatan pendataan sangat diperlukan karena jumlah supir atau agen travel ilegal yang berubah-ubah setiap waktunya sehingga untuk mengetahui jumlah supir atau agen travel ilegal yang lebih akurat, maka pendataan menjadi satu-satunya cara. Jumlah supir atau agen travel ilegal bisa saja berbeda dengan data yang ada pada pemerintah. Mungkin saja jumlah mereka yang sebenarnya lebih banyak tetapi pemerintah telah berupaya untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dengan kegiatan pendataan tersebut.

4. Penyuluhan (Sosialisasi)

Dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi terhadap angkutan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Pekanbaru. Adapun yang disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Pekanbaru adalah:

- a. Tentang kelengkapan izin kendaraan dan pengemudi kendaraan, seperti KIR (Pengujian kendaraan secara berkala/6 bulan), SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK, Surat izin Trayek.
- b. Tentang prosedur atau standarisasi kendaraan atau angkutan umum, seperti dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus.
- c. Tentang ketegasan sanksi yang diberlakukan apabila terjaring razia, seperti Tilang.

Beberapa tindakan pemerintah diatas memang belum bisa dikatakan efektif dan berhasil untuk menekan jumlah supir atau travel ilegal di Kota Pekanbaru. Disamping kebijakan diatas masih ada lagi kebijakan terbaru yang akan dilakukan pemerintah dalam melaksanakan ketertiban sosial khususnya tentang travel atau agen ilegal, yaitu dengan mensosialisasikan dan melaksanakan yang telah diamanahkan dalam PERDA lebih intensif lagi, diwajibkan setiap travel atau agen ilegal ini harus mengajukan

rekomendasi angkutan AJDP (Antar Kota Dalam Propinsi), lebih mengkoordinasikan lagi antar instansi, dan memberikan pembinaan dengan cara melakukan pengawasan rutin.

B. HAMBATAN-HAMBATAN UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENERTIBKAN ANGKUTAN UMUM

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dilapangan, ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Dari Pemerintah

- a) Belum adanya regulasi yang jelas dari Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun dari Pemerintah Propinsi Riau berupa Perda ataupun Pergub dan Perwako yang menjadikan angkutan Antar Jemput lebih legal formal dalam beraktivitas.
- b) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pengusaha angkutan travel liar.

2. Dari Unsur Dinas Perhubungan

- a) Tidak adanya kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan POLRI dalam melaksanakan penertiban angkutan umum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b) Minimnya anggota Dinas Perhubungan dan POLRI yang bertugas langsung dalam penertiban angkutan umum tersebut.
- c) Kurangnya kontrol dari personil pegawai terhadap aktif atau tidaknya operasional dari Jaringan Internet yang ada di Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru.
- d) Belum beroperasi optimal pos penjagaan di sekitar kawasan Simpang Garuda Sakti.
- e) Banyaknya kepentingan-kepentingan yang sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
- f) Tidak adanya akses menuju terminal Payung Sekaki baik itu seperti angkutan kota bus dan oplet yang mempunyai trayek khusus menuju terminal sehingga terminal Payung Sekaki sulit dijangkau dan terasa jauh bagi para penumpang.

3. Dari Unsur Masyarakat

- a) Keengganan warga ke terminal untuk mencari mobil angkutan.
- b) Terminal bayangan lebih singkat dan tempatnyapun tidak jauh, mudah dijangkau tanpa harus menunggu ke terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS).

- c) Masih kurang mengertinya masyarakat mengenai Angkutan AJDP yang secara jelas, resmi dan mendapat izin beroperasi.

4. Dari Unsur PO/Supir

- a) Masih banyaknya armada pengangkutan orang (PO) yang membandel, yang memberangkatkan penumpang dan menurunkan penumpang dari atau ke Pekanbaru tanpa melalui terminal.
- b) Pemilik angkutan atau supir armada angkutan yang ada merasa penghasilannya menurun karena agen harus menyediakan *service car* demi persaingan dalam mendapatkan penumpang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban angkutan umum khususnya masalah travel ilegal masih belum mampu menyelenggarakannya dengan baik.
2. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan penertiban angkutan umum khususnya masalah travel ilegal, yaitu pengawasan, razia/penjaringan, pendataan, penyuluhan/sosialisasi.
3. Hambatan yang dihadapi dari upaya Dinas Perhubungan dalam penertiban angkutan umum khususnya masalah travel ilegal di Kota Pekanbaru dari unsur Pemerintahan, dari unsur Dinas Perhubungan, dari unsur masyarakat dan dari unsur PO/Supir.

B. SARAN

1. Dinas perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru seharusnya membentuk tim atau UPTD sendiri yang khusus menangani persoalan Angkutan Umum, khususnya Angkutan Antar jemput Dalam Provinsi (AJDP). Sehingga, pengelolaan Angkutan AJDP lebih maksimal dan dapat terselenggara dengan baik. Kemudian juga sekaligus adanya penambahan jumlah infrastruktur pendukung, karena ada

- penambahan porsi SDM. Sehingga, diharapkan kedepannya kinerja akan lebih baik dan memuaskan.
2. Masyarakat dan supir travel atau agen travel selayaknya harus memperhatikan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan agar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Kumpulan buku:

- Abidin, Zaid Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancar Sawah.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset Yogyakarta.
- Trianto & Titik Triwulan Tutik. 2010. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan & Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan perundang-undangan dan sumber lain:

- Anissaisyaa. 2011. *Artikel KOORDINASI (Pengertian, Kebutuhan, Masalah dan Teori)*. Artikel ini diakses pada tanggal 29 November 2011, dari <http://anissaisyaa.blogspot.com/2011/11/koordinasi-pengertian-kebutuhan-teori.html>

Erni, Daly. 2008. *Artikel Pengawasan*. Artikel ini diakses pada tanggal 28 April 2008, dari

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bdIIroJaEcIJ:images.dalyerni.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SBXJ@QoKCE0AACvqJvk1/PE%20NGAWASAN.ppt?nmid%3D93387110+%22pengertian+pengawasan%22&hl=id&gl=id>

<http://bappeda.pekanbaru.go.id/page/9/kota-pekanbaru/>

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Penertiban.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Siraj, Nurudin. 2011. *Artikel Teori Pengawasan*. Artikel ini diakses pada bulan Agustus 2011, dari <http://nurudinsiraj.blogspot.com/2011/08/bberapa-nukilan-teori-pengawasan.html>

Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor 551/DISHUB/1225.

Yosa. 2010. *Artikel Pengertian Pengawasan*. Artikel ini diakses pada tanggal 1 Juli 2010, dari <http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>